



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan....

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 49.A/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**
- KESATU** : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 25 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Penduduk Kabupaten Pati yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini akan memudahkan penyelenggara pemilihan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam menyusun dan menetapkan Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
2. Agar semua penduduk Kabupaten Pati yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih;
3. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.

13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
20. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
21. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan Verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya

digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
24. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati.
26. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indeoenden Pemilihan Kabupaten/Kota,

- Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;

9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Pati yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
2. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2, berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;

- d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
 6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
 7. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
 8. KPU melakukan sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7, hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu Terakhir.
 9. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7, dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 8, kepada KPU Kabupaten Pati sebagai bahan pemutakhiran.
 10. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
 11. KPU Kabupaten Pati menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud

pada angka 8 dan angka 9.

12. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
13. KPU Kabupaten Pati menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11, kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten Pati dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3, berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

6. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
9. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 7.

10. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 9, kepada PPS.
11. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
12. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 10.
13. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
15. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12, dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14, kepada PPK dan KPU Kabupaten Pati dalam bentuk softcopy.
16. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 15, dilakukan dalam bentuk hardcopy.
17. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15.
18. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 18, dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
20. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
21. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 20, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 21, menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
24. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 21, dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 23, paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
25. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17, ke dalam formulir Model A1.2-KWK.
26. Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 25, disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Pati;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
27. KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf a.

28. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 27, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati.
29. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 28, dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pati, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 29, PPK, Panwas Kabupaten Pati, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
31. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 30, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
32. KPU Kabupaten Pati wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 31, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
33. KPU Kabupaten Pati menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 27, ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Pati;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
34. KPU Kabupaten Pati dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 27, menggunakan formulir Model A1-KWK.
35. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 34, kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
36. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 35, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pati.
37. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 35.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
 - b. Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.

3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
5. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK
6. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
8. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
9. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 8, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
10. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
11. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 10, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
12. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 6, kepada :
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Pati;
 - c. Panwas Kecamatan;

- d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
13. KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a.
14. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati.
15. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 14, dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pati, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
16. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten Pati, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
17. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
18. KPU Kabupaten Pati wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
19. KPU Kabupaten Pati menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 13, ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
20. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 19 kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Pati;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

21. KPU Kabupaten Pati menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 13 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
22. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Desa/Kelurahan;
 - b. pengumuman disekretariat/balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
23. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 22, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pati.
24. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam angka 22.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), karena belum terdaftar dalam DPT dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Pati.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Pati untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten Pati berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6 dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Pati mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Pati.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pati dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Pati memasukkan data

DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Pati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pati memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Pati menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pati terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pati, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten Pati.
3. KPU Kabupaten Pati wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Pati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga

Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.

2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten Pati melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati, rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

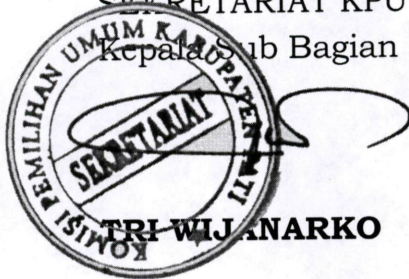
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati
Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016
Tanggal : 25 Agustus 2016

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

| NO | KODE | NAMA |
|---------|----------|--|
| MODEL A | | |
| 1. | A-KWK | Data Pemilih |
| 2. | AA-KWK | Data Pemilih Baru |
| 3. | AA.1-KWK | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih |
| 4. | AA.2-KWK | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian |
| 5. | A1-KWK | Daftar Pemilih Sementara |
| 6. | A1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan |
| 7. | A1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan |
| 8. | A1.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten |
| 9. | A1.A-KWK | Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS |
| 10. | A2-KWK | Daftar Tanggapan Masyarakat |
| 11. | A3-KWK | Daftar Pemilih Tetap |
| 12. | A3.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan |
| 13. | A3.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan |
| 14. | A3.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten |
| 15. | A.4-KWK | Daftar Pemilih Pindahan |
| 16. | A.5-KWK | Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) |
| 17. | A.Tb-KWK | Daftar Pemilih Tambahan |

Ditetapkan di Pati
Padatanggal 25 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KETUA

ttd

MUCH. NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum

TR WIJANARKO



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017



Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|-----|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017



Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|-----|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU;
2. Jenis dan Tahun Pemilihan;
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian;
5. Jumlah Keluarga;
6. Jumlah Pemilih;
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah;
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten : Pati
 2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi : Jawa Tengah
 3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
 2 Desa/Kel : Ketua,
 3 Kecamatan :
 4 Kabupaten : Pati
 5 Provinsi : Jawa Tengah
 (.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten : Pati
 2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi : Jawa Tengah
 3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)
 1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
 2 Desa/Kel : Ketua,
 3 Kecamatan :
 4 Kabupaten : Pati
 5 Provinsi : Jawa Tengah
 (.....)



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: JAWA TENGAH
: PATI

Kecamatan
Desa/Kelurahan

:
:

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PATI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di, Tanggal,,,

PPDP

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: JAWA TENGAH
: PATI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di Pati Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Ketua

(.....)

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...



Model A1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA

KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



Model A1.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|---------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN
KABUPATEN PATI

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



Model A1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN PATI

KABUPATEN : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|----------------|--------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab Pati Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: JAWA TENGAH
: PATI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | JENIS TANGGAPAN | KET. DATA | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Hasil Pemeriksaan |
|----|-----------------------|-----------|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|-------------|----|----|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TAMBAH / UBAH / HAPUS | AWAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENJADI | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di, Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PATI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di Pati, Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
Ketua

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

(MUCH. NASICH, S.Si)



Model A3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA
KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



A.3.2-KWK.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA : PATI

PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|---------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

KABUPATEN PATI

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



A.3.3-KWK.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN PATI

KABUPATEN : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|----------------|--------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab Pati Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI

TAHUN 2017

PROVINSI : JAWA TENGAH Kecamatan :
KABUPATEN : PATI Desa/Kelurahan :

| No | No KK | NIK | Nama | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

Ditetapkan di, Tanggal,,,

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: PATI

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

Model A.Tb-KWK

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di, Tanggal,,,

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

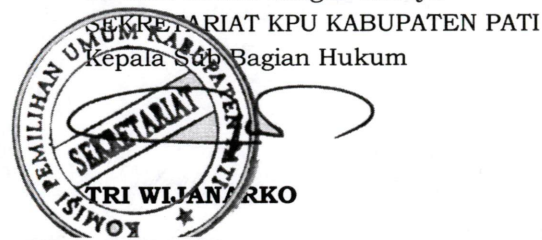
- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- nah Kawin

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal ... dari ...



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KETUA

ttd
MUCH. NASICH